



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAHA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI BUDIPRAYITNO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 91118

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.535.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/100 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 13400 m2 di KAB / KOTA LOMBOK UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.340.000.000
3. Tanah Seluas 2434 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 6680 m2/15 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 990.000.000
5. Tanah Seluas 1088 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 730.000.000
7. Tanah Seluas 2300 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/78 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **114.500.000**

1. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000



2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	14.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	459.150.781
F. HARTA LAINNYA	Rp.	315.000.000
Sub Total	Rp.	6.437.650.781

III. HUTANG	Rp.	92.659.945
-------------	-----	------------

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.344.990.836
-----------------------------------	-----	---------------

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.